

KANTOR PEMERINTAHAN TERPADU KABUPATEN WONOSOBO

Oleh : Prita Shintania, Wijayanti, Erni Setyowati

Seiring dengan laju pertumbuhan perekonomian dan pembangunan yang semakin pesat dan jumlah penduduk yang terus meningkat, maka meningkat pula tuntutan masyarakat terhadap pelayanan pemerintahan yang profesional, efisien, efektif, transparan, partisipatif, dan tanggap terhadap aspirasi masyarakat. Melihat fenomena tersebut, Pemerintah Kabupaten Wonosobo berupaya memusatkan semua instansi di dalam satu lokasi, dikarenakan letak beberapa instansi saat ini menyebar di seluruh Kabupaten Wonosobo. Hal ini menyebabkan kurang terpadunya kinerja antar instansi sehingga pelayanan kepada masyarakat kurang optimal. Dengan adanya Kantor Pemerintahan Terpadu, diharapkan kinerja antar instansi dapat lebih optimal.

Kajian diawali dengan mempelajari pengertian dan hal-hal mendasar mengenai Pemerintah Daerah, standar-standar mengenai bangunan kantor, studi banding beberapa Kantor Pemerintahan, dan Tinjauan Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo. Tapak yang digunakan adalah tapak yang berada di Jalan Banyumas Wonosobo dengan luas ± 3,1 ha. Selain itu juga dibahas mengenai tata massa bangunan, struktur, serta utilitas yang dipakai dalam perancangan “Kantor Pemerintahan Terpadu Kabupaten Wonosobo”

Konsep perancangan ditekankan dengan penekanan desain Neo Vernakular, yaitu arsitektur yang menerapkan bentuk yang mengambil unsur budaya setempat, lingkungan, dan iklim setempat yang diungkapkan pada bentuk dasar arsitektur. Untuk bangunan Kantor sendiri, dirancang dengan konsep terpadu, yaitu terhubung antar bangunan satu dengan bangunan yang lain dengan menggunakan flying corridor di setiap bangunan.

Kata Kunci : Kantor Pemerintahan, Wonosobo, Neo Vernakular, Terpadu

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, Pemerintah memerlukan sarana dan prasarana, yakni kantor yang representatif. Kantor Pemerintahan merupakan wadah aktifitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, tempat wakil rakyat mengatur jalannya pemerintahan dan pembangunan di segala sektor kehidupan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kantor Pemerintahan memerlukan tuntutan khusus, yakni wadah yang berperan sebagai simbol filosofis, fungsional, dan teknis, serta fungsi keterbukaan sebagai simbol wakil dari masyarakat suatu daerah. Seiring dengan laju pertumbuhan perekonomian dan pembangunan yang semakin pesat dan jumlah penduduk yang terus meningkat, maka meningkat pula tuntutan masyarakat terhadap pelayanan pemerintahan yang profesional, efisien, efektif, transparan, partisipatif, dan tanggap terhadap aspirasi masyarakat. Pemerintah Kabupaten Wonosobo berupaya memusatkan semua instansi di dalam satu lokasi, dikarenakan letak beberapa instansi saat ini menyebar di seluruh Kabupaten Wonosobo. Hal ini menyebabkan kurang terpadunya kinerja antar instansi sehingga pelayanan kepada masyarakat kurang optimal. Berdasarkan uraian diatas, dibutuhkan Kantor Pemerintahan yang terpadu untuk memudahkan koordinasi dan meningkatkan kinerja antar instansi,

serta mampu memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Kualitas fasilitas publik yang menyangkut sarana dan prasarana Pemerintahan dan kemasyarakatan perlu disesuaikan dengan kebutuhan yang diperlukan sekarang dengan juga harus tetap memperhitungkan perkembangan kedepan dalam membangun pemerintahan yang bijak.

2. Tujuan

Tujuan dari pembangunan “Kantor Pemerintahan Terpadu Kabupaten Wonosobo” adalah mendesain sebuah kantor pemerintahan yang terintegrasi / terpadu antar instansi. Selain itu, pembangunan Kantor Pemerintahan Terpadu ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Pemkab. Wonosobo dalam pembangunan kantor sebagai sarana dan prasarana pendukung kegiatan pemerintahan.

3. Metodologi

Kajian diawali dengan mempelajari pengertian dan hal-hal mendasar mengenai Pemerintah Daerah, standar-standar mengenai bangunan kantor, studi banding beberapa Kantor Pemerintahan di Semarang dan Kabupaten Sleman. Tapak yang digunakan adalah tapak yang berada di Jalan Banyumas Wonosobo dengan luas ± 3,1 ha. Selain itu juga dibahas mengenai tata massa dan ruang

bangunan, penampilan bangunan, struktur, serta utilitas yang dipakai dalam perancangan “Kantor Pemerintahan Terpadu Kabupaten Wonosobo”

TINJAUAN PUSTAKA

1. Pengertian Pemerintah Daerah

Menurut UU No.32 Tahun 2004 pengertian Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

2. Susunan Organisasi Pemerintah Daerah

Selain memiliki tugas dan kewenangan, dalam penyelenggaraan pemerintahan terdapat susunan organisasi guna mengatur kelancaran kegiatan yang ada. Susunan organisasi Pemerintah Daerah terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah sesuai dengan kebutuhan daerah. Adapun susunan Pemerintah Daerah menurut UU no.32 Tahun 2004 adalah :

- a. Sekretariat Daerah
Sekretariat Daerah merupakan unsur staf Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah (Bupati).
- b. Dinas Daerah
Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.
- c. Lembaga Teknis Daerah
Lembaga Teknis daerah merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

3. Pengertian Bangunan Kantor

Hal yang sering tertangkap di benak kita apabila mendengar kata kantor adalah tempat dimana orang bekerja. Tetapi disamping itu, kantor memiliki beberapa pengertian. Berikut ini adalah pengertian dan definisi kantor, menurut :

- a. Kamus Besar Bahasa Indonesia
Kantor merupakan Balai (gedung, rumah, ruang) tempat mengurus suatu pekerjaan (perusahaan)
- b. Menurut W. Gleen Howard dan Edward Masonbrink (1963), kantor adalah pusat dari kegiatan administrasi dan berfungsi sebagai suatu kamar kerja dan belajar, suatu ruang rapat, suatu tempat perundingan, suatu pusat penerangan, suatu pusat pemberian layanan, suatu ruang perjamuan dan seringkali sebagai lambang dari kedudukan.
- c. Menurut Cyril M. Harris (1975), *Building office is a building used for profesional or clerical purpose, except no part of which is used for living purpose, except by the janitor's family*
Bangunan kantor adalah bangunan yang digunakan untuk kegiatan profesional atau kegiatan ketatausahaan, tidak ada bagian yang digunakan untuk tempat tinggal, kecuali bagi penjaga gedung tersebut.
- d. Menurut kamusbesar.com , arti kata terpadu adalah sudah dipadu (disatukan, dilebur menjadi satu, dsb)

Dari beberapa pengertian kantor diatas, dapat disimpulkan bahwa kantor adalah ruang tempat berlangsungnya kegiatan administrasi, mempunyai kesatuan dengan lingkungan organisasi keseluruhan dan sebagai lambang kedudukan. Sedangkan Kantor Pemerintahan Terpadu adalah Tempat berlangsungnya beberapa kegiatan pemerintahan yang disatukan kedalam satu wilayah sehingga tercipta kerjasama antar kegiatan yang satu dengan yang lain.

4. Persyaratan Bangunan Kantor Pemerintahan

Suatu kantor pemerintahan selalu dituntut agar dapat memberikan pelayanan yang maksimal dan optimal baik pada para pelaku didalam bangunan tersebut maupun bagi masyarakat yang dilayaninya. Sebagai kantor pemerintahan ada persyaratan yang harus dapat dipenuhi (The Liang Gie, 1978:8), persyaratan itu antara lain adalah :

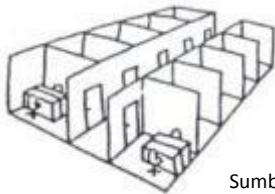
- a. Sebagai ruang karyawan (personil)
Beberapa aspek yang harus dipenuhi dalam menciptakan kondisi lingkungan pekerjaan yang optimal :
 - Aspek Fisiologis : kenyamanan yang meliputi penerangan, suhu, suara, dan penghawaan.
 - Aspek Psikologis : berhubungan dengan kepuasan jiwa penghuni di dalamnya
 - Aspek Sosiologis : terpenuhinya kebutuhan sosial dan terjadinya hubungan kerja yang baik.

- b. Sebagai wadah organisasi
 Dalam bangunan kantor, perlu diperhatikan instansi yang akan menempati bangunan tersebut, terutama mengenai :
- Mempertimbangkan terjadinya reorganisasi
 - Tampilan bangunan harus mencerminkan karakter dari organisasi yang berada di dalamnya
 - Harus dapat mengantisipasi semua rencana pengembangan kedepan.

5. Sistem Penataan Ruang Kantor

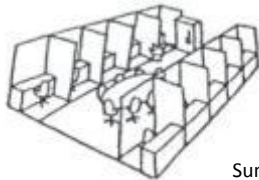
Pembagian ruang pada suatu bangunan kantor dapat dikelompokkan menjadi :

- a. *Cellular*, penataan *cellular* merupakan penataan ruang dalam bentuk tradisional. Koridor sempit dengan banyak ruang di kanan kiri. Kapasitas @ 5 orang, dan kedalaman ruang 12 m.



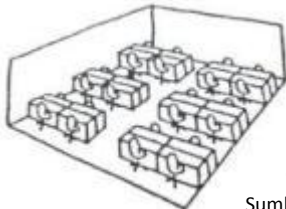
Gambar 1. Cellular
 Sumber : Planning Office Space

- b. *Group Space*, merupakan perkembangan bentuk *cellular*, dengan ruang yang lebih luas dan fleksibel. Jarak koridor ke luar ± 15-20 m



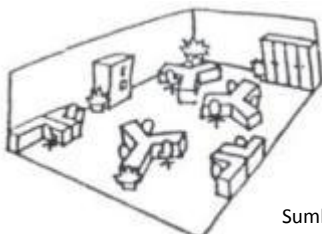
Gambar2. Group Space
 Sumber : Planning Office Space

- c. *Open Plan*, bentuk penataan open plan adalah bentuk penataan geometri yang kaku, layout ruangan yang sangat luas, susunan ruang fleksibel menurut kebutuhan pemakai, dan berdasarkan pembagian sub definisi dan ruang kerja.



Gambar 3. Open Plan
 Sumber : Planning Office Space

- d. *Landscape*, batas-batas sirkulasi daerah kerja memberi identitas kelompok. Tirai, tanaman, lemari *furniture* membentuk jalur sirkulasi.



Gambar 4. Landscape
 Sumber : Planning Office Space

STUDI BANDING

1. Kantor Pemerintahan Kabupaten Sleman



Gambar 5. Kantor BKD Sleman
 Sumber : Dokumentasi Pribadi



Gambar 6. Kantor Bupati Sleman
 Sumber : Dokumentasi Pribadi

Merupakan kompleks kantor pemerintahan yang terletak di daerah Tridadi, Sleman. Kantor Pemerintahan di Kabupaten Sleman termasuk kedalam Kantor pemerintahan terpadu karena semua instansi terletak dalam satu kawasan. Hal ini menunjukkan koordinasi setiap dinas / Instansi baik dalam hal kegiatan pelaksanaan atau pelayanan maupun kegiatan administrasi.

Terdapat keseragaman bangunan di Kantor Pemerintahan Kabupaten Sleman. Perbedaan hanya terdapat antara bangunan baru dan bangunan lama. Bangunan baru antara lain terdapat pada Dinas Pendidikan, Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi, Dinas Tenaga Kerja dan Sosial, serta Badan Kepegawaian Daerah. sedangkan bangunan lama terdapat pada Dinas Pekerjaan Umum dan kantor Kesbanglinmas. Fasad pada bangunan baru mengadaptasi ragam arsitektur modern, sedangkan pada bangunan lama masih mengadaptasi ragam arsitektur kolonial, karena bangunan tersebut merupakan peninggalan pada zaman Belanda. Untuk Area parkir di setiap instansi, sebagian besar terdapat pada bagian depan bangunan. Luasan area parkir relatif memenuhi untuk saat ini dan sudah tertata dengan rapi.

2. Balaikota Semarang



Gambar 7. Tampak Depan Balaikota Semarang
 Sumber : Dokumentasi Pribadi



Gambar 8. Kantor Walikota
 Sumber : Dokumentasi Pribadi

Kawasan Balaikota Semarang merupakan pusat pemerintahan Kota Semarang, terletak di Jl. Pemuda No. 148 Semarang. Meskipun Balaikota merupakan pusat pemerintahan Kota Semarang, tetapi tidak semua Instansi berada di dalam kawasan Balaikota. Instansi-instansi yang berada di dalam kawasan Balaikota yaitu Kantor Walikota, Kantor DPRD, Sekretariat Daerah; Dinas Sosial,

Pemuda, dan Olahraga; Dinas Tata Kota dan Perumahan; Badan Pelayanan Perijinan Terpadu; Badan Kesbangpol Linmas; Dinas Koperasi dan UKM. Dinas-dinas yang berlokasi diluar kawasan Balaikota Semarang antara lain Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, dan masih banyak lagi.

Tampilan fasade Balaikota masih mengadaptasi langgam arsitektur kolonial. Sebagian besar bangunan mempunyai kondisi struktur bangunan yang masih baik. Kondisi kurang baik terdapat pada bangunan semi permanen di belakang kawasan.

Untuk Area parkir mobil terdapat pada bagian depan dan belakang kawasan serta memanfaatkan ruang antar bangunan, sedangkan area parkir motor terdapat di samping dan bagian dalam kawasan. Luasan area parkir relatif memenuhi untuk saat ini, tetapi tidak tertata dengan rapi. Lapangan upacara terletak pada bagian depan kawasan, menyatu dengan area parkir. Tuntutan luasan dan kebebasan pandangan menyebabkan pada lapangan upacara tidak terdapat peneduh sehingga terasa panas.

Kesimpulan dari studi banding diatas apabila dilihat dari Ekspresi bangunan adalah terdapat perbedaan tampilan pada bangunan baru dan bangunan lama. Sedangkan dari tata ruang luar, pada Kantor Pemkab Sleman belum tertata secara menyeluruh, luasan area parkir saat ini sudah relatif memenuhi tetapi belum tertata dengan rapi. Pada Balaikota Semarang, penataan landscape belum tertata secara menyeluruh, area parkir juga belum tertata dengan rapi.

TINJAUAN PEMDA WONOSOBO

1. Organisasi Pemda Kabupaten Wonosobo

Dalam kegiatan Pemerintahan, Kabupaten Wonosobo dipimpin oleh seorang Bupati yang dibantu oleh Perangkat daerah. Perangkat daerah merupakan pembantu Bupati, terdiri dari unsur staf yang membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi, diwadahi dalam lembaga sekretariat, unsur pendukung tugas Bupati dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik, diwadahi dalam lembaga teknis daerah, serta unsur pelaksana urusan daerah yang diwadahi dalam dinas daerah.

2. Dinas dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Wonosobo

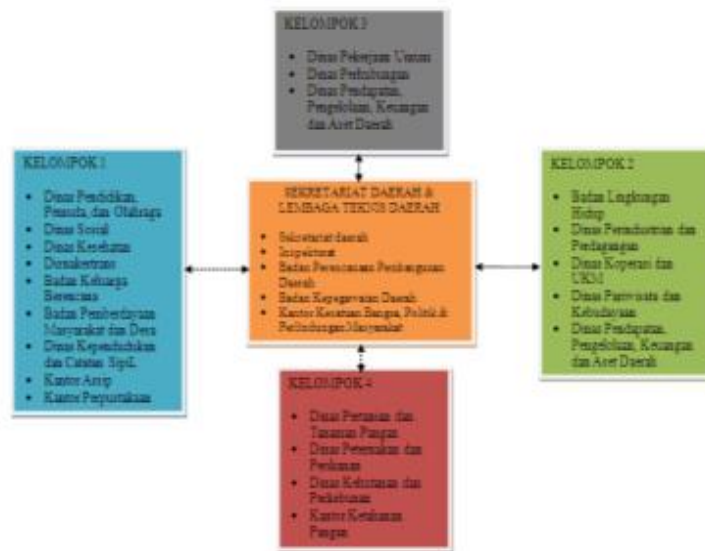
Berdasarkan Peraturan Daerah No.12 tahun 2008 disebutkan bahwa terdapat 14 dinas dan 10 lembaga teknis daerah di Kabupaten Wonosobo. Dinas-dinas tersebut yaitu Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika, Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pariwisata, dan Kebudayaan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan, Dinas Peternakan dan Perikanan, Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, serta Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

Sedangkan Lembaga Teknis Daerah yang terdapat di Kabupaten Wonosobo yaitu Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Badan Keluarga Berencana, Badan Kepegawaian Daerah, Badan Lingkungan Hidup, Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat, Kantor Ketahanan Pangan, Kantor Arsip, Kantor Perpustakaan. Semua Dinas dan Lembaga Teknis Daerah termasuk ke dalam SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah).

3. SKPD yang Berada di Lingkungan Kantor Pemerintahan Terpadu Kabupaten Wonosobo

Dari semua SKPD yang telah disebutkan sebelumnya, terdapat beberapa SKPD yang memiliki keterkaitan/ hubungan berdasarkan koordinasi kegiatan sesuai dengan tupoksi (tugas pokok dan fungsi) masing-masing SKPD. Dinas-dinas dan Lembaga Teknis Daerah tersebut yaitu :



Pada perencanaannya, pembangunan Kantor Pemerintahan Terpadu Kabupaten Wonosobo dilakukan bertahap sesuai dengan kelompok SKPD yang tertera pada gambar diatas. Kelompok SKPD yang pembangunannya dilakukan lebih awal (tahap pertama) yaitu SKPD kelompok 2 dan Kelompok Lemtekda (Lembaga Teknis Daerah).

4. Lokasi Kantor Pemerintahan Terpadu Kabupaten Wonosobo

Kantor Pemerintahan Terpadu Kabupaten Wonosobo akan dibangun pada tapak yang berada di Jalan Banyumas, Kelurahan Tawangsari, Wonosobo (BWK IV). Luas tapak yaitu ± 3,1 ha dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Perumahan Tawangsari
- Selatan : STM Wiratama
- Barat : Area Persawahan
- Timur : Lapangan Pertamina

Perda terhadap tapak :

- GSB 16 m
- KDB maks. 80%
- KLB 3,2



Gambar 9. Tapak Kantor
Sumber : Google Earth

Karena pembangunan Kantor Pemerintahan Terpadu Kabupaten Wonosobo akan dilakukan dalam beberapa tahap, maka pengembangan akan diarahkan ke bagian belakang tapak. Dalam arti, pembangunan tahap pertama dilakukan pada bagian depan tapak.



PERANCANGAN KANTOR PEMERINTAHAN TERPADU KABUPATEN WONOSOBO

Poin-poin yang ada dalam perancangan “Kantor Pemerintahan Terpadu Kabupaten Wonosobo” antara lain :

- **Pencapaian**
Diakses melalui Jalan Banyumas, dengan lebar jalan 14 meter, merupakan daerah yang dilewati jalur utama Wonosobo-Purwokerto-Jakarta.
- **Sirkulasi**
Sirkulasi kendaraan masuk ke tapak melalui Jalan Banyumas. Terdapat satu *main entrance* ditengah tapak untuk jalur utama, dan *side entrance* di tepi tapak untuk jalur servis. Untuk masuk area kantor dibagi menjadi 2 bagian. Pejalan kaki menggunakan jalur pedestrian, sedangkan kendaraan diakses langsung dengan jalur dua arah di sisi kiri-kanan jalur pedestrian.
- **Tata massa**
Penataan massa bangunan di kelompokkan sesuai kelompok kerja. Kantor Bupati dan Sekretariat daerah diletakkan di bagian tengah untuk menonjolkan fungsi sebagai bangunan utama.
- **Pendekatan Desain Kantor Pemerintahan Terpadu**
Penekanan desain yang diambil adalah Neo Vernakular. yaitu arsitektur yang menerapkan bentuk yang mengambil unsur budaya setempat, lingkungan, dan iklim setempat yang diungkapkan pada bentuk dasar arsitektur. Untuk bangunan Kantor sendiri, dirancang dengan konsep terpadu, yaitu terhubung antar bangunan satu dengan bangunan yang lain dengan menggunakan flying corridor di setiap bangunan.

Dari analisa kebutuhan ruang, diperoleh perhitungan terhadap luasan perancangan, yaitu sebagai berikut :

▪ **Luasan Perancangan**

Luas bangunan = 9332,9 m²

$$\begin{aligned} \text{Luas lantai dasar} &= \frac{\text{Luas Bangunan}}{\text{KLB}} \\ &= \frac{9332,9}{3,2} \\ &= 2916,5 \text{ m}^2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Luas tapak} &= \frac{\text{Luas lantai dasar}}{\text{KDB}} \\ &= \frac{2916,5}{0,8} \\ &= 3645,7 \text{ m}^2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Luas kebutuhan lahan total} &= \\ &= \text{luas tapak} + \text{luas ruang outdoor} \\ &= 3645,7 + 7973,6 \\ &= 11.619,3 \text{ m}^2 \end{aligned}$$

Jadi, Luas Lahan yang dibutuhkan untuk membangun Kantor Pemerintah Terpadu Kabupaten Wonosobo adalah seluas **11.619,3 m²**.

Luas tapak terpilih yaitu **31.720 m²**, sisa lahan **20.100,7 m²** digunakan untuk pengembangan Pembangunan SKPD tahap berikutnya.

Sedangkan untuk perancangan tata masa, konsep bentuk, tampilan bangunan, serta struktur dan utilitasnya, dirancang sebagai berikut :

- Tata massa dan ruang bangunan Penataan massa bangunan di kelompokkan sesuai kelompok kerja. Zoning dibagi berdasarkan private – semipublic – public – service. Konsep penataan Masa bangunan menggunakan konsep terpusat, dengan Kantor Bupati dan Setda sebagai pusat bangunan dan dikelilingi oleh bangunan-bangunan lain.



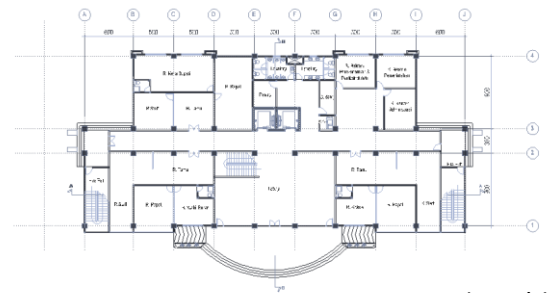
Gambar 10. Siteplan
Sumber : Penulis, 2012

- Keterangan :
- A : Kantor Bupati dan Setda
 - B : Kantor Dinas Daerah
 - C : Kantor Lembaga Teknis Daerah

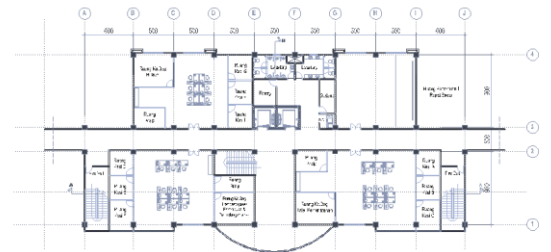


Gambar 11. Sequence tampak bangunan dari luar tapak
Sumber : Penulis, 2012

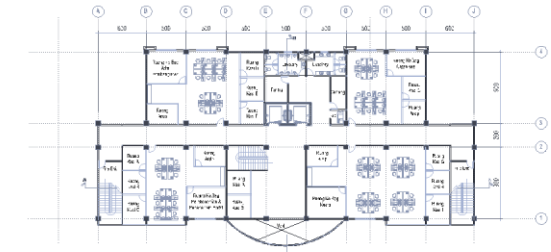
Bentuk kantor dirancang besar, tinggi, dan monumental dengan bentuk dasar persegi panjang. Hal ini dikarenakan bentuk kotak / persegi panjang merupakan bentuk yang paling sesuai dengan kebutuhan ruang-ruang di dalam kantor.



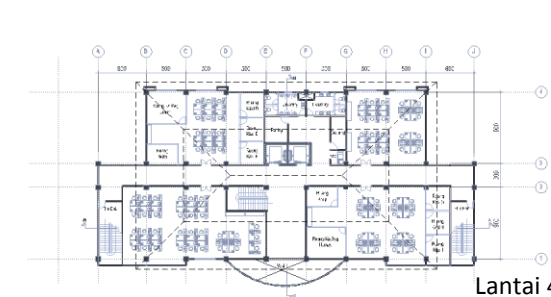
Lantai 1



Lantai 2



Lantai 3

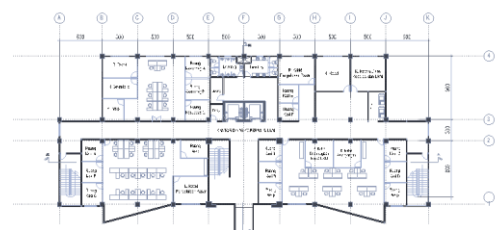


Lantai 4

Gambar 12. Gedung A (Kantor Bupati dan Setda)
Sumber : Penulis, 2012



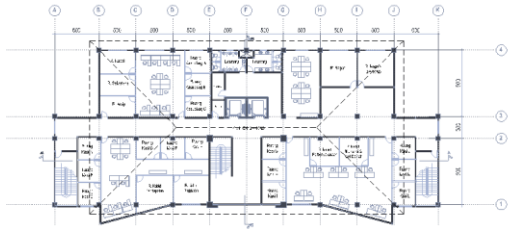
Lantai 1



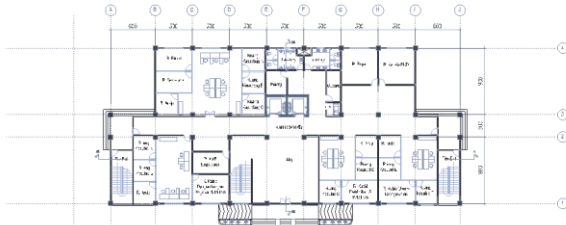
Lantai 2



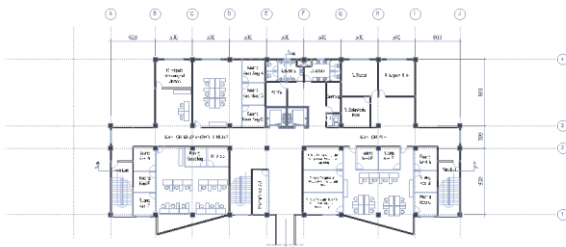
Lantai 3



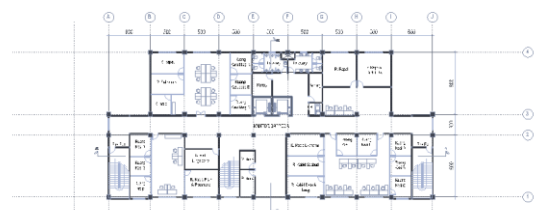
Gambar 13. Gedung B (Kantor Dinas) Lantai 4
Sumber : Penulis, 2012



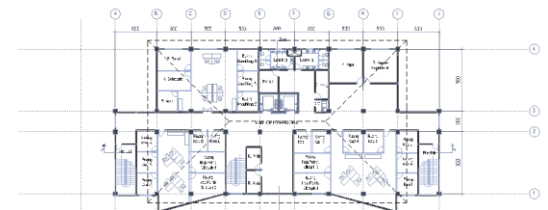
Lantai 1



Lantai 2



Lantai 3



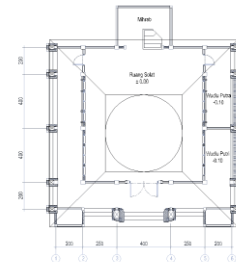
Lantai 4

Gambar 14. Gedung C (Kantor Lemtekda)
Sumber : Penulis, 2012

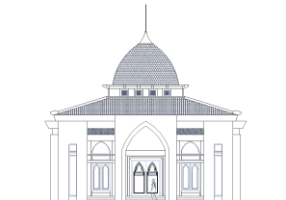


Gambar 15. Perspektif Kawasan
Sumber : Penulis, 2012

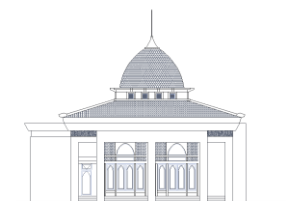
Konsep bangunan lainnya mengikuti konsep desain, siteplan, dan bentuk blok massa keseluruhan yang telah dirancang.



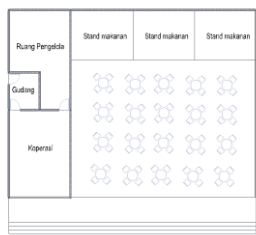
DENAH MASJID



TAMPAK DEPAN MASJID



TAMPAK SAMPING MASJID



DENAH KANTIN & KOPERASI



TAMPAKAN

Gambar 16. Bangunan Penunjang

Sumber : Penulis, 2012



Gambar 17. Flying Corridor

Sumber : Penulis, 2012

▪ Struktur

Sub Structure

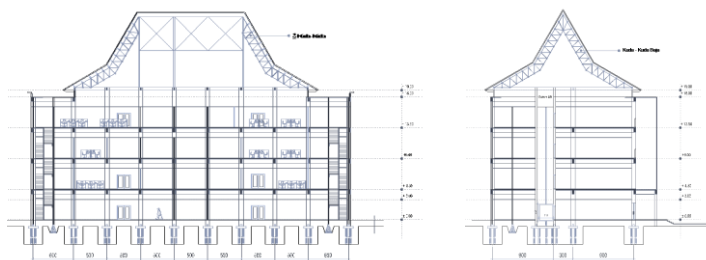
Ada 2 jenis pondasi yang digunakan, yaitu pondasi footplat dan pondasi boredpile. Boredpile digunakan pada gedung A, gedung B, dan gedung C (bangunan utama) karena bangunan-bangunan tersebut merupakan bangunan tinggi sehingga membutuhkan pondasi yang kuat. Selain itu dalam pemasangannya, boredpile tidak menimbulkan getaran seperti pemasangan tiang pancang sehingga tidak mengganggu lingkungan sekitar. Pondasi footplat digunakan pada bangunan penunjang seperti masjid dan kantin.

Mid Structure

Seluruh bangunan utama menggunakan struktur beton betulang, kolom yang digunakan yaitu ukuran 60x60 dengan modul 9x5.

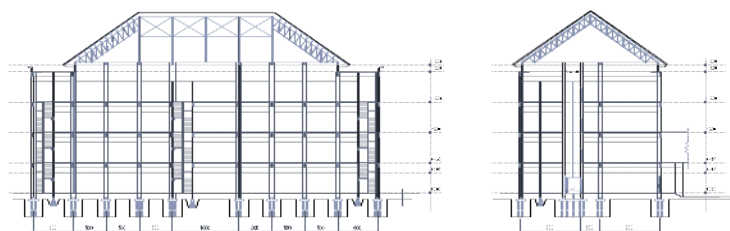
Upper Structure

Seluruh bangunan menggunakan atap dengan rangka baja konvensional.



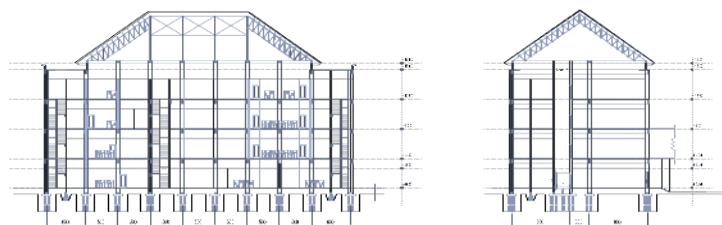
Gambar 18. Potongan Gedung A

Sumber : Penulis, 2012



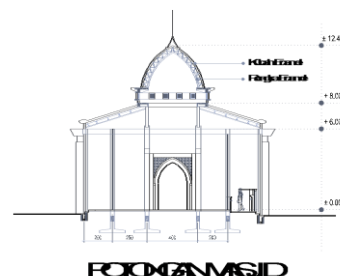
Gambar 19. Potongan Gedung B

Sumber : Penulis, 2012



Gambar 20. Potongan Gedung C

Sumber : Penulis, 2012



▪ Utilitas

- Jaringan Air Bersih, menggunakan sumber dari PDAM, dengan sistem distribusi *down feed*, yakni air ditampung di ground reservoir, kemudian dipompa ke atas dan diteruskan keseluruh unit ruangan yang membutuhkan.
- Jaringan air kotor berupa pemipaan yang meliputi pembuangan dari air kotor kloset, urinoir, wafel, kamar mandi, dan jaringan pembuangan air hujan yang disalurkan kedalam bak penampungan, sumur pengendapan untuk kotoran padat dan mengalirkan air kotor ke riol kota. Jaringan Listrik, menggunakan sumber utama dari PLN dan genset sebagai cadangan.

- Jaringan Komunikasi, menggunakan intercom, HT, speaker, LAN untuk jaringan data Komputer, PABX, telepon, faximile, dan internet.
- Jaringan Transportasi Vertikal, menggunakan tangga utama dan darurat
- Jaringan Pengkondisian Udara, penghawaan buatan menggunakan AC, untuk penghawaan alami menggunakan ventilasi.
- Jaringan Penangkal Petir, menggunakan sistem Faraday.
- Jaringan Pengamanan Bangunan, untuk mencegah dari bahaya kebakaran digunakan detektor asap yang dilengkapi dengan sprinkle serbuk, water sprinkle, fire hydrant, hydrant pillar dan fire extinguisher. Sedangkan untuk pengamanan dari tindak kriminal menggunakan CCTV.

KESIMPULAN

“Kantor Pemerintahan Terpadu Kabupaten Wonosobo” dirancang dengan konsep penekanan desain Neo Vernakular. Luasan tapak yang dipakai adalah 31.720 m². Luas lantai dasar bangunan sebesar 2916,5 m². Penataan massa bangunan di kelompokkan sesuai fungsi bangunannya dan kelompok kerja, dimana Kantor Bupati dan Setda diletakkan didepan bagian tengah supaya mendapat kesan sebagai pusat dari semua bangunan yang ada. Bentuk bangunan kantor dirancang dengan konsep denah berbentuk persegi panjang dengan maksud mengoptimalkan fungsi ruang yang ada di dalam kantor. Sebagian besar bangunan menggunakan struktur beton bertulang dengan pondasi boredpile maupun footplat dan rangka atap baja konvensional.

DAFTAR PUSTAKA & REFERENSI

- Duffy, Francis, dkk. 1997. *Planning Office Space*. London : The Architectural Press
- Harris, Cyril, M. 2005. *Dictionary of Architecture and Construction*. United States of America : McGraw-Hill Professional
- Howard, Glenn, dkk. 2006. *Administration of physical education*. Michigan University : Harper & Row
- Jimmy, Juwana. 2005. *Panduan Sistem Bangunan Tinggi*. Jakarta
- Gie, The Liang. 1983. *Administrasi Perkantoran Modern*. Yogyakarta : Nur Cahaya
- Neufert, Ernst. 2002. *Data Arsitek Jilid 2*. Jakarta: Penerbit Erlangga
- Panero, Julius dan Martin Zelmik. 1979. *Human Dimension & Interior Space*. New York : Billboard Publication, Inc.

Purwadarminta, Wjs. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga*. Jakarta : Balai Pustaka.

Wina, Noeroel Pungki. 2006. Redesain Komplek Pemerintahan Kota Semarang. Landasan Program Perencanaan dan perancangan Arsitektur (LP3A). Jurusan Arsitekturr FT UNDIP (tidak dipublikasikan)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Wonosobo.

RUTRK Kabupaten Wonosobo 2007-2025

Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah

<http://www.kamusbesar.com/28087/terpadu>, diakses tgl 3 Maret jam 11.22

<http://www.slemankab.go.id/>, diakses tanggal 1 Maret jam 09.15

http://id.wikipedia.org/wiki/Pegawai_negeri, diakses tanggal 12 Maret jam 09.08

